

KEBIJAKAN KHALIFAH AL-MA'MUN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM

Imam Nurhakim

IAINU Kebumen

e-mail: hakim_yes43@yahoo.co.id



Abstrak

Sejarah telah mencatat bahwa Islam telah mengalami masa kejayaannya yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah. Kejayaan tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu keagamaan maupun ilmu umum, yang memberikan kontribusi besar tidak hanya bagi dunia Islam tetapi juga bagi bangsa Eropa sejak saat itu dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Dari sekian banyak Khalifah yang berkuasa pada masa Dinasty Abbasiyah yang menorehkan tinta emasnya, Khalifah Al Makmun, Putra dari Khalifah Harun Al-Rasyid, merupakan salah satu Khalifah yang menunjukkan kegigihannya di dalam mewujudkan kejayaan Islam melalui kebijakannya di dalam mengembangkan pendidikan Islam. Al-Ma'mun banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dijadikan sarana belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada waktu itu. Selain itu Al-Ma'mun juga mengembangkan Baitul Hikmah sebagai tempat penerjemahan buku-buku dan sarana halaqah-halaqah yang membahas dan mengkaji keilmuan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Khalifah Al-Ma'mun, Pendidikan Islam.*

A. Pendahuluan

Bila melihat sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, paling tidak diawali dengan dua strategi, yaitu; *pertama* dengan mencari sistem pendukung dan penyebaran ide secara rahasia, hal ini sudah berlangsung sejak abad pertama

hijriyah yang bermarkas di Syam dan tepatnya di Al-Hamimah, sistem ini berakhir dengan bergabungnya Abu Muslim Al-Khurasani pada *jam'iyah* yang sepakat atas terbentuk Daulah Abbasiyah. Sedangkan strategi *kedua* dilanjutkan dengan terang-terangan dan himbauan-himbuan di forum-forum resmi untuk mendirikan Daulah Abbasiyah berlanjut dengan peperangan melawan Daulah Umayyah. Dari dua startegi yang diterapkan oleh Muhammad bin Al-Abasy dan kawan-kawannya sejak akhir abad pertama sampai 132 H akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya Daulah Abbasiyah.¹

Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah, dimana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Dimana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abass. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) sampai dengan 656 H(1258 M).²

Seiring dengan stabilnya kondisi sosial politik terutama terutama pada masa pertengahan pemerintahan Abbasiyah, aktivitas pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu mengagumkan. Beberapa prestasi umat Islam pada masa ini mampu menempatkan umat Islam pada puncak kejayaannya. Peradaban Islam menapaki zaman keemasan (*The Golden Age*). *The Golden Age* atau zaman kemasan Islam berlangsung pada zaman dinasti Abbasiyah merupakan fakta sejarah. Perbandingan kemajuan yang pernah diperoleh antara masa Nabi, Khilafah Rasyidah, kekuasaan Bani Umayyah dengan kekuasaan Dinasti Abbasiyah juga sangat signifikan. Kalau kemajuan Islam pada masa Nabi dapat disebut sebagai kemajuan di bidang agama dan politik, pada masa khalifah Rasyidah sebagai kemajuan politik dan militer, pada masa Bani Umayyah sebagai kemajuan politik, ekonomi dan militer, maka kemajuan Dinasti Abbasiyah menambah panjang pencapaian kemajuan itu yakni politik, militer, ekonomi, sains dan peradaban.

¹ Ali Nupiah, *Pola dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Periode Abbasiyah*, dalam Samsul Nizar (Ed) "Sejarah Pendidikan Islam", Cetakan ke 4 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 65.

² Khaled Abou El Fadl, *Musyawaharab Buku : Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab*, (Jakarta : Serambi, 2000), hlm. 537.

Pada bidang pendidikan pemerintahan Abbasiyah memberikan torehan sejarah yang sangat istimewa. Produk pendidikan Islam pada babak ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kebangkitan peradaban Erofa. Perkembangan intelektual dimulai dengan diterjemahkannya khasanah intelektual Yunani klasik seperti filsafat Aristoteles, Khalifah sendiri mengalokasikan anggaran khusus untuk menggaji para penterjemah. Untuk melengkapi kehausan terhadap ilmu pengetahuan, Harun al-Rasyid mendirikan perpustakaan yang diberi nama Bait al- Hikmah. Lembaga ini selain berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penerjemahan juga berfungsi sebagai akademi. Cabang-cabang ilmu yang diutamakan dalam Bait al-Hikmah adalah filsafat, ilmu kedokteran, matematika, optic, fisika, geografi, astronomi dan sejarah. Penerjemahan buku-buku Yunani merupakan salah satu factor dalam gerakan intelektual yang dibangkitkan dalam dunia Islam abad ke -9 dan terus berlanjut sampai abad ke- 12.

Menurut W. Montgomery Watt, sebelum munculnya penerjemahan buku-buku Yunani telah terjadi kegiatan intelektual yang gencar dikalangan orang-orang islam terutama mengenai masalah-masalah fiqih.³ Sedangkan menurut Mehdi Nakosten, gerakan penerjemahan yang berlangsung di Baghdad tidak dapat dilepaskan dari gerakan penerjemahan yang sebelumnya dilakukan pada masa kerajaan Sassaniah, yakni yang berpusat di sebuah akademi Jundishapur. Akademi ini merupakan pusat penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani serta Hindu ke dalam bahasa Pahlevi. Dari sekolah ini pula muncul beberapa terjemahan penting dari bahasa Sansekerta, Pahlevi, dan Syiria ke dalam bahasa Arab.⁴

Masa Peradaban Islam mencapai puncak keemasan pada masa Daulah Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini Negara Islam menjadi kiblat ilmu pengetahuan dari bangsa barat. Pada masa ini pula lahir beberapa ulama-ulama Islam yang tidak hanya berkompeten dalam bidang agama. Akan tetapi mereka juga menjadi perintis dari lahirnya beberapa ilmu dalam bidang eksakta. Sebagai contoh adalah Al-Khawarizmi yang dalam teorinya memunculkan angka 0 sebagai kelengkapan dari angka numerik arab. Kemudian ada Ar-Razi

³ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam Tinjauan Kritis*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1990), hlm. 100.

⁴ Mehdi Nakosten, *History of Islamic Origins of Western Education AD 800-1350*.(Colorado : University of Colorado Press, 1964), hlm.33.

yang menemukan virus penyakit campak sekaligus membuat vaksinnnya. Ada lagi Ibnu Sina yang mendapat julukan dari orang barat “Bapak Kedokteran Modern” dengan karya-karyanya yang tidak perlu diragukan lagi dalam memberikan kontribusi di dunia kedokteran. Kemudian Ibnu Rusyd yang juga mengeluarkan karya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Dan yang terakhir ada Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali dengan karyanya yang sangat fenomenal yakni Ihya’ Ulumuddin.

Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya terjadi di zaman khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M) dan puteranya Al-Ma’mun (813-833 M).⁵ Dalam makalah ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang kebijakan khalifah Abdullah Al Ma’mun tentang pendidikan. Menurut hemat penulis, tema ini menarik untuk dikaji, dengan memakai pendekatan sejarah-politik, ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil al-Makmun kaitannya dengan pendidikan Islam, yang dikatakan mengalami kemajuan signifikan pada masanya.

B. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah teori tentang kebijakan (*policy*). Demikian karena pembahasan ini ingin mengkaji bagaimana kebijakan Khalifah Al-Ma’mun tentang pendidikan Islam. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.⁶ Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.⁷ Harold D Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai *a projected program of goals, values dan practice* yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.⁸

⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 20.

⁶ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 2.

⁷ Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003), hlm. 23-24.

⁸ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 15.

Tentang kebijakan, ada dua klasifikasi; kebijakan publik (*public policy*) dan kebijakan privat (*privat policy*). Keduanya memiliki makna dan maksud yang berbeda. Kebijakan publik biasanya dibuat oleh pemerintah dan memberikan dampak yang besar dan luas pada publik. Sedangkan kebijakan privat biasanya dibuat oleh badan perseorangan atau swasta, namun bisa juga kebijakan tersebut membawa dampak dan mengikat pada publik, misalnya kebijakan yang berupa iklan dari perusahaan di media televisi yang memberikan dampak yang besar bagi publik.⁹

Dalam kajian ini, teori yang digunakan adalah kebijakan publik yang kemudian berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Khalifah Al-Ma'mun sebagai pimpinan, ketika mengambil kebijakan maka akan berimplikasi atau berpengaruh terhadap orang banyak, terutama dalam hal ini adalah kebijakannya tentang pendidikan. Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi.

Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan, sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Sedangkan menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkan (*what government did, why they do it, and what differences in makes*).¹⁰

Beragam definisi tentang kebijakan publik dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat yang mengemuka. *Pertama*, pendapat yang memandang bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat ini cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, pendapat yang memusatkan perhatian pada

⁹ Mada Sutapa, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik...*, hlm. 2.

¹⁰ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan...*, hlm. 34.

implementasi kebijakan (*policy implementation*). Pandangan yang pertama melihat bahwa kebijakan public merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan pandangan yang kedua beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya.

Peters membagi tingkat kebijakan dengan menggolongkan berdasarkan pengaruhnya terhadap perubahan yang ditimbulkan pada kehidupan masyarakat. Pada tingkat pertama adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah (pemegang kekuasaan) yang hasilnya berupa kebijakan untuk dilakukan (*policy in action*). Pada tingkat kedua adalah *output* kebijakan, yang mana pemerintah melaksanakan hasil-hasil kebijakan dengan membelanjakan uang dan membuat peraturan pelaksanaan yang akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada tahap ketiga adalah *policy impact* (akibat-akibat kebijakan) yang ditimbulkan oleh berbagai pilhan yang dilaksanakan oleh pemerintah.¹¹

Berkaitan dengan perumusan kebijakan, menurut Nugroho, model yang dapat digunakan yakni model kelembagaan, model proses, model kelompok, model elit, model rasional, model inkremental, model permainan, model pilihan public, model sistem, model demokratis, model strategis, dan model deliberatif. Ketiga belas model tersebut diuraikan secara ringkas sebagai berikut.¹²*Pertama*, Model kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik dengan memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Artinya, tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah.

Kedua, model proses berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Artinya, kebijakan publik merupakan proses politik dengan rangkaian kegiatan; identifikasi permasalahan, pengembangan program atau kebijakan, dan evaluasi program atau kebijakan. *Ketiga*, model teori kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi

¹¹ B. Guy Peters, *American Public Policy Procces and Performance*, (New York: Frankiln Watts, 1982), hlm. 73.

¹² Ryan Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 23.

kebijakan yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara intensif. *Keempat*, model elit berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdiri dari kelompok elit yang memegang kekuasaan dan kelompok massa yang tak memiliki kekuasaan. Rumusan kebijakan merupakan preferensi politik dari para elit yang berkuasa sehingga apabila terjadi bias formulasi dapat dimaklumi sebagai kelemahan pendekatan model tersebut. *Kelima*, model rasional menganggap bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. *Keenam*, model inkrementalis pada dasarnya bersifat pragmatis atau praktis karena memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh penguasa sebelumnya di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

Ketujuh, model demokratis menitikberatkan pada pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari *stakeholders*. *Kedelapan*, model startegis menggunakan formula tuntutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. *Kesembilan*, model pilihan publik dalam membuat formulasi kebijakan berakar dari teori ekonomi pilihan publik yang berasumsi bahwa manusia adalah mahluk *homo economicus* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Adapaun *kesepuluh* model sistem dalam formulasi kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting, kalau tidak ada implementasi maka kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Dengan pendekatan-pendekatan procedural dan manajerial tahap implementasi kebijakan mencakup langkah-langkah sebagai berikut:¹³

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 112.

2. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dari rangkaian tahap di atas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. Hal yang demikian karena bisa jadi adanya implementasi gap (kesenjangan implementasi), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (*implementation capacity*).¹⁴

Pendidikan merupakan *public good* (barang dan jasa milik publik), dan merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks tersebut, kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peran mendasar menyediakan kesempatan belajar. Hal ini relevan dengan sebuah pernyataan bahwa pemimpin/khalifah yang baik adalah yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, atau yang semangat dalam mengembangkan pendidikan. Oleh karenanya, aspek pendidikan sebagai *public goods* dalam dimensi kebijakan pendidikan sangat terkait dengan perspektif kebijakan publik.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

C. Sejarah Khalifah Al-Makmun

Nama lengkap khalifah ini adalah Abdullah Abbas Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun dilahirkan pada tanggal 15 rabi'ul awal 170 H/ 786 M. Bertepatan dengan wafat kakeknya Musa Al-Hadi dan naik tahta ayahnya, Harun Al-Rasyid. Al-ma'mun termasuk putra yang jenius, sebelum usia 5 tahun ia dididik agama dan membaca Al-Qur'an oleh dua orang ahli yang terkenal bernama kasai Nahvi dan Yazidi. Selain belajar Al-Qur'an, ia juga belajar Hadits dari Imam Malik di Madinah. Kitab yang digunakan adalah karya Imam Malik sendiri, yaitu kitab Al-muwatha. Disamping ilmu-ilmu itu, ia juga pandai Ilmu sastra, belajar Ilmu tata Negara, hukum filsafat, astronomi, dan lain sebagainya. Sehingga ia dikenal sebagai pemuda yang pandai. Setelah berhasil mengatasi berbagai konflik internal, terutama dengan saudara nya bernama Al-Amin, akhirnya Al-Ma'mun menggapai cita-citanya menjadi khalifah pada tahun 198 H/ 813 H

Al-Ma'mu adalah Seorang Khalifah termasyhur sepanjang sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Selain seorang pejuang pemberani, juga seorang penguasa yang bijaksana. Pemerintahannya menandai kemajuan yang sangat hebat dalam sejarah Islam. Selama lebih kurang 21 tahun masa kepemimpinannya mampu meninggalkan warisan kemajuan intelektual islam yang sangat berharga. Kemajuan itu meliputi berbagai aspek ilmu pengetahuan, seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Al-Makmun memerintah dari tahun 198-218 H/808-833 M.¹⁵

Al-Makmun diangkat menjadi khalifah ke 7 Daullah Abbasiyah pada usia 28 tahun dan memerintah selama 20 tahun. Pada masa kekhalfahannya dipandang sebagai masa puncak keemasan dan kebesaran Daulah Abbasiyah.¹⁶ Pengangkatan Al-Makmun sebagai khalifah dilatarbelakangi oleh konflik bersaudara dengan pasukan Al-Amin. Sewaktu Al-Amin menjabat sebagai khalifah di Baghdad, sementara Al-Makmun menjabat sebagai Gubernur (amir) di kota Khurasan ibu kota Asia Tengah waktu itu. Persaingan antara dua orang saudara itu tampaknya tidak bisa dilepaskan dengan persaingan antara

¹⁵ Ali Nupiah, *Pola dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Periode Abbasiyah*, dalam Samsul Nizar (Ed) "Sejarah Pendidikan Islam", Cetakan ke 4 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 71.

¹⁶ Dewan Redaksi Ensikopedi, *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: Internasa, 1994), hlm. 149

para pendukung kedua khalifah tersebut, yaitu amir-amir Arab dan amir-amir Persia, untuk memperbaiki supremasi politik pada pemerintahannya. Al-Amin adalah putra Harun, dari Zubaedah yang keturunan Arab, sedangkan Al-Makmun putra Harun dari keturunan Persia. Menurut Muir, Al-Ma'mun adalah pujaan rakyat Khurasan dan mereka menyebutnya anak dari saudara perempuan kita.¹⁷

Setelah kematian Al-Amin, naiklah Al-Ma'mun sebagai khalifah pada tahun 813 M. Al-Ma'mun diangkat menjadi khalifah pada usia 28 tahun. Jauh berbeda dengan al-Amin, Al-Ma'mun memiliki sifat pemaaf, ia juga kurang berminat terhadap hiburan dan permainan.¹⁸

Al-Ma'mun sebagai pengganti ayahnya meneruskan tradisi keilmuan dan penerjemahan karya-karya ilmunan Yunani ke dalam bahasa Arab. Al-Ma'mun merupakan tokoh Bani Abbas yang paling utama keilmuannya, keberanian, kehebatan, dan kecerdasannya, jauh berbeda dengan saudaranya al-Amin. Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang sangat mencintai akan ilmu pengetahuan dan saleh perangnya. Sifat dan watak baiknya itulah yang menyebabkan ia mampu mengemban jabatan pemerintahannya selama 20 tahun. Akan tetapi kebesaran jiwa dan perangai baik Al-Ma'mun, mendapat sorotan yang tajam, ketika terjadi kontroversi mengenai pemberlakuan mihnah terhadap lawan-lawan diskusinya.¹⁹ Mihnah ini merupakan semacam lembaga penyelidikan yang berfungsi untuk meneliti paham seseorang, terutama para pejabat pemerintahan pada saat itu.

Dalam masa pemerintahannya, al-Ma'mun banyak menghadapi berbagai masalah, rintangan dan ancaman atas keutuhan dinasti Abbasiyah, khususnya ancaman internal akibat adanya perang saudara dengan pihak al-Amin. Kendati demikian al-Ma'mun dapat mengatasi semuanya dengan sikap yang tegas lagi arif dan bijaksana. Walau demikian, pemberontakan-pemberontakan yang timbul bukanlah dilatarbelakangi oleh perebutan kekuasaan, akan tetapi lebih dikarenakan oleh faktor-faktor etnis dan iri atas keberhasilan-keberhasilan yang diraih oleh Al-Ma'mun.²⁰

¹⁷ William Muir, *The Caliphate; Its Rise, Decline, and Fall*, (London: Darf Publisher, 1984), hlm. 484.

¹⁸ Didin Saefudin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, (Jakarta: Pustakan Internas, 2009), hlm. 94.

¹⁹ Dewan Redaksi Ensikopedi, *Ensiklopedi Islam 3*, (Jkrata: Internasa, 1994), hlm. 151.

²⁰ Badri Yatim, *Sejarah...*, hlm. 62.

Dalam hal paham keagamaan, Al-Ma'mun menunjukkan keberpihakannya kepada paham Mu'tazilah.. Hal ini tampaknya tidak dapat dipisahkan dari kehausannya terhadap ilmu pengetahuan yang rasional, dan kecintaannya terhadap filsafat. Al-Ma'mun wafat pada hari Rabu, tanggal 13 Jumadil Akhir, pada waktu sedang berperang melawan Romawi di Bazandon.²¹ Beliau dimakamkan di tempat itu juga pada tahun 218 H. Setelah Al-Ma'mun wafat, maka posisi kekhalifahan digantikan oleh Al-Mu'tshim pada tahun 899 M.

D. Kebijakan Al-Makmun tentang Pendidikan

Pendidikan dan politik (kekuasaan), keduanya merupakan elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap Negara. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisah, yang satu sama lainnya tidak memiliki hubungan apa-apa, padahal saling bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara, lebih dari itu juga saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik membawa dampak besar pada karakteristik pendidikannya. Jadi antara pendidikan dan politik (kekuasaan) itu mempunyai hubungan erat dan dinamis. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Oleh karena itu, kebijakan penguasa tentang pendidikan akan sangat berpengaruh bagaimana perkembangan dan kemajuan pendidikan tersebut. Pada poin ini penulis akan menguraikan bagaimana pengaruh kebijakan al-Makmun tentang pendidikan Islam yang berkembang pada masa kekuasaannya.

Sebagaimana yang telah digambarkan di atas, al-Ma'mun sebagai seorang khalifah, menaruh perhatian yang serius dalam pengembangan pendidikan. Hal ini dapat dilihat misalnya beliau banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dijadikan sarana belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada waktu itu. Beliau juga gencar melakukan penerjemahan-penerjemahan dan halaqah-halaqah yang membahas dan mengkaji keilmuan.

²¹ C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hln. 117.

Di antara lembaga pendidikan yang didirikan yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan “gudangnya” ilmu, karena disitu disimpan buku-buku keilmuan. Perpustakaan berkembang luas pada masa dinasti Abbasiyah, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan pribadi. Faktor yang menyebabkan berkembangnya perpustakaan, antara lain adalah meluasnya penggunaan bahan kertas untuk menyalin kitab-kitab, bermunculannya para penyalin kitab, dan berkembangnya para sastrwan dan ulama, di samping itu penghargaan terhadap ilmu pengetahuan mendorong kaum muslimin untuk membeli kitab-kitab dari berbagai negeri.²² Pada saat itu perpustakaan mejadi tempat yang sangat penting dalam pengembangan keilmuan dan kebudayaan.

Perpustakaan dan pendidikan tinggi yang paling terkenal di Bagdad selama masa kepemimpinan al-Ma'mun adalah *Bait al-Hikmah*. *Bait al-Hikmah*, menurut Ibnu an-Nadhim, dibangun pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan dilanjutkan pada masa khalifah Al-Amin untuk kemudian direnovasi kembali oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 217H/832M dengan biaya satu juta dolar.²³ Lembaga ini menggabungkan perpustakaan, sanggar sastra, lingkaran studi dan observatium sekaligus, yang kesemuanya itu di bawah kekuasaan al-Ma'mun. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Jundhisapur Academy.²⁴ Namun berbeda dari institusi pada masa Sasania yang hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk raja.

Pada masa Al-Ma'mun, *Bait al-Hikmah* digunakan secara lebih maju yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, bahkan Etiopia dan India. Di institusi ini al-Makmun memperkerjakan Muhammad ibn Musa al-Hawarizmi yang ahli di bidang al-jabar dan astronomi. Orang-orang persia juga diperkerjakan di Bait al-Hikmah. Direktur Bait al-hikmah sendiri adalah seorang Nasionalis persia dan ahli Pahlewi, Sahl Ibn Harun. Di bawah kekuasaan al-Makmun, Bait

²² Hery Noor Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 220.

²³ M. Mukhlis Fahrudin, *Pusat Peradaban Islam Abad Pertengahan; Kasus Bayt Al-Hikmah*, El-Harakah, Vol. 11, No. 3. hlm. 191.

²⁴ Lathiful Khuluq, et.al. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 126.